

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sejak lama dipandang sebagai ruang strategis dalam pembentukan kesadaran politik warga negara, khususnya generasi muda. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai arena diskursus kritis yang mampu memengaruhi arah dan kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, mahasiswa kerap menjadi aktor penting dalam merespons dinamika politik nasional, baik melalui kajian akademik maupun aksi kolektif di ruang publik. Peran ini menjadi semakin relevan ketika negara dihadapkan pada kebijakan strategis yang menyentuh prinsip dasar demokrasi, seperti supremasi sipil dan relasi sipil-militer, yang kembali mengemuka pasca revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2025 (Suwito, 2025).

Tingkat demokratis suatu peraturan perundangan dapat diukur dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya (Wafa, 2023). Sejalan dengan pendapat ini keterlibatan mahasiswa dalam isu politik justru menunjukkan partisipasi yang semakin kuat di ruang publik. Di berbagai perguruan tinggi, mahasiswa kembali tampil sebagai kelompok sosial yang aktif merespons arah kebijakan nasional, terutama ketika kebijakan tersebut dinilai menyimpang dari nilai-nilai reformasi. Demonstrasi yang dilakukan mengingatkan pada peran historis mahasiswa

pada era Reformasi 1998, ketika perguruan tinggi menjadi pusat dalam tuntutan demokratis. Aksi-aksi tersebut adalah wujud kesadaran politik yang terbangun atas kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil, sebuah pengalaman historis yang pernah membentuk trauma kolektif masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru.

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti revisi UU TNI dari aspek hukum, politik hukum, framing media, serta masalah partisipasi publik dalam proses legislasi. Kajian framing media menunjukkan bahwa revisi UU TNI dibingkai secara kritis karena dianggap mengancam agenda reformasi dan membuka ruang bagi kembalinya simbol dwifungsi ABRI. Proses revisi UU TNI dinilai minim transparansi dan belum mencerminkan prinsip meaningful participation masyarakat (Juliano A. Wangku1, 2025). Saat ini masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana pendidikan politik di perguruan tinggi memengaruhi sikap mahasiswa terhadap kebijakan tersebut.

Revisi UU TNI 2025 tidak hanya dipahami sebagai produk hukum semata, tetapi juga sebagai simbol arah politik negara. Substansi revisi UU TNI berpotensi memperluas peran militer di luar fungsi pertahanan dan berisiko menghidupkan kembali residu dwifungsi ABRI dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Ikhsan Yosariea, 2025). Respons dari mahasiswa terutama dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan terhadap revisi ini menunjukkan bahwa sikap politik mereka terbentuk

melalui interaksi antara pengetahuan akademik, pengalaman sosial, dan dinamika politik aktual.

PPKN tidak hanya menekankan aspek kognitif tentang negara dan hukum, tetapi juga pembentukan sikap kewarganegaraan yang demokratis, kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, sikap mahasiswa PPKN terhadap revisi UU TNI menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pendidikan politik di perguruan tinggi, khususnya melalui mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, dalam membentuk civic disposition mahasiswa terhadap isu-isu strategis kenegaraan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik terhadap Sikap Mahasiswa PPKN FISH UNJ dalam Revisi UU TNI 2025. Penelitian ini merupakan pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (*Civic Akademik*) yang diharapkan mampu mengisi celah kajian sebelumnya dengan menempatkan pendidikan politik di perguruan tinggi sebagai variabel kunci dalam pembentukan sikap mahasiswa terhadap kebijakan negara, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh mata kuliah Pengantar Ilmu Politik terhadap sikap mahasiswa PPKN FISH UNJ dalam menyikapi revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025?
2. Sejauh mana pemahaman mahasiswa PPKN FISH UNJ terhadap substansi dan implikasi revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025?
3. Bagaimana peran mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dalam membentuk sikap mahasiswa PPKN FISH UNJ terhadap isu revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh mata kuliah Pengantar Ilmu Politik bukan mata kuliah lain terhadap sikap mahasiswa.
2. Penelitian ini membahas sikap mahasiswa yang dikaji dan dibatasi pada sikap terhadap Revisi UU TNI 2025, bukan isu politik nasional lainnya.
3. Responden penelitian ini dibatasi pada mahasiswa yang telah/sedang mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Politik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah mata kuliah Pengantar Ilmu Politik berpengaruh terhadap sikap mahasiswa dalam Revisi UU TNI 2025?
2. Seberapa besar pengaruh mata kuliah Pengantar Ilmu Politik terhadap sikap mahasiswa dalam Revisi UU TNI 2025?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian yang membahas keterkaitan antara mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dan sikap mahasiswa terhadap isu politik, khususnya revisi UU TNI Tahun 2025. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur dalam ilmu politik, terutama dalam memahami bagaimana pendidikan politik di lingkungan perguruan tinggi berperan dalam membentuk respons dan pandangan mahasiswa terhadap isu-isu kenegaraan yang sedang berkembang.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan kajian literasi politik dan literasi digital, khususnya terkait cara mahasiswa mengakses, menafsirkan, dan merespons informasi politik yang beredar di ruang publik. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat konsep *civic responsibility*, dengan menunjukkan adanya hubungan antara proses pembelajaran ilmu politik dan pembentukan sikap kewarganegaraan yang lebih kritis, demokratis, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kegunaan bagi:

2.1 Mahasiswa PPKN FISH UNJ

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa PPKN, dalam meningkatkan pemahaman dan sikap kritis terhadap isu politik dan kebijakan negara, terutama revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025. Melalui pemahaman yang diperoleh dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, mahasiswa diharapkan mampu menilai isu kenegaraan secara rasional, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, serta memiliki kesadaran kewarganegaraan yang demokratis dan bertanggung jawab.

2.2 Universitas dan Program Studi PPKN FISH UNJ

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan kurikulum serta proses pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Penelitian ini dapat membantu program studi dalam melihat sejauh mana mata kuliah tersebut berperan dalam membentuk sikap politik mahasiswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan agar lebih kontekstual, relevan dengan isu aktual, dan mampu memperkuat nilai-nilai demokrasi di lingkungan akademik..

2.3 Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai *Civic Responsibility*, *Political Knowledge* dan menerapkannya dalam konteks yang relevan dengan pengalaman langsung sebagai mahasiswa PPKN. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang peran pendidikan politik dalam membentuk sikap kewarganegaraan mahasiswa serta sebagai bekal akademik dan intelektual dalam pengembangan keilmuan di bidang pendidikan kewarganegaraan.

